

**KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Eka Sisra Gusni
NPP. 30.1184

*Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email : ekasisragusni@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M. Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Bone County has some people who feel that they don't care about political education, people feel that political education is only for those who are involved in politics. The low awareness of the public to participate in politics is also due to the lack of public trust in the government. Thus, regional autonomy needs to be carried out in order to restore the trust of local people and provide political education opportunities for democracy in the regions **Purpose:** This study aims to analyze the performance of the National and Political Unity Agency in the implementation of political education, knowing the obstacles faced by the National and Political Unity Agency in the implementation of political education and the efforts made by the National and Political Unity Agency in overcoming the problem of implementing political education in Bone district, South Sulawesi Province.

Methods: This study uses qualitative methods with a descriptive approach and uses performance theory from Simora as an analysis knife. **Result:** The results obtained from this study are that with competence, the performance of the National and Political Unity Agency in the implementation of political education that will be provided is also maximum and will be carried out smoothly and well. Performance dimension, psychological dimension and organizational dimension. In carrying out the duties of the National and Political Unity Agency of Bone Regency, there are inhibiting factors and supporting factors. There are two supporting factors and inhibiting factors that affect the performance of the National and Political Unity Agency. **Conclusion:** The performance of the National and Political Unity Agency of Bone District, South Sulawesi Province, in improving political education has been good, but there are still some inhibiting factors such as the limited quantity of human resources and the lack of public awareness of the importance of political education because they consider political education only for those who enter politics.

Keywords: Performance, Unitary and Political Bodies, Political Education.

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Kabupaten Bone terdapat beberapa masyarakat yang merasa tidak peduli dengan pendidikan politik, masyarakat merasa bahwa pendidikan politik hanya bagi mereka yang terjun dalam dunia politik. Rendahnya akan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik juga dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian otonomi daerah perlu dilakukan agar supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat lokal dan memberikan peluang pendidikan politik untuk berdemokrasi di daerah. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pelaksanaan pendidikan politik ,mengetahui kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik serta upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengatasi masalah pelaksanaan pendidikan politik di kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teori kinerja dari Simora sebagai pisau analisisnya. **Hasil/ Temuan :** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya kompetensi maka kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yang akan di berikan juga maksimal dan akan terlaksana dengan lancar dan juga baik. Dimensi kinerja, dimensi psikologis dan dimensi organisasi. Dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Terdapat dua faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. **Kesimpulan :** Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pendidikan politik sudah baik namun masih ada beberapa faktor penghambat seperti kuantitas SDM yang terbatas serta masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya Pendidikan politik karena mereka menganggap Pendidikan politik hanya bagi mereka yang terjun ke dunia politik. **Kata Kunci :** Kinerja, Badan Kesatuan dan Politik, Pendidikan Politik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pada saat ini sedang berada pada tahun politik, fenomena ini dapat kita lihat dari maraknya pemberitaan terkait dengan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 2024. Politik tidaklah sesempit pemungutan suara dalam pemilu lebih jauh dari itu segala hal yang menyangkut kepentingan bersama termasuk urusan politik. Terminologi tahun politik mulai lazim digunakan setelah populer di media massa, disebut dengan tahun politik karena pada rentang waktu dua tahun terdapat pesta demokrasi yang dilakukan secara besar besaran. Iklim politik Indonesia pada tahun terakhir diwarnai dengan kasus politisasi yang mampu mencederai nalar demokrasi, politisasi mulai dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Indonesia menganut sistem demokrasi, masyarakat merupakan unsur paling penting dalam berlangsungnya sistem tersebut di Indonesia. Partisipasi politik bagian dari partisipasi politik aktif dan pasif. Pendidikan politik merupakan metode preventif yang cukup efektif untuk mengeliminasi konflik massa dalam kegiatan politik. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan politik serta mampu dijadikan sebagai pelaku politik itu sendiri perlu dilakukan upaya secara sistematis, sedangkan pemahaman masyarakat tentang politik masih sangat rendah dapat dilihat ketika terselenggaranya pemilihan umum dimana masyarakat hanya memilih pasangan calon atau kandidat partai dilihat dari seberapa banyak oknum tersebut diantaranya memberikan sebuah bantuan seperti uang tunai bahkan bahan pangan kepada masyarakat. Artinya menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam hal pendidikan politik masih kurang. Berdasarkan rekapitulasi hasil daftar pemilih yang ada di Kabupaten Bone pada tahun 2022 sebanyak 550.739 (lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh

sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki laki berjumlah 260.572 (dua ratus enam puluh ribu lima puluh ribu limaratus tujuh puluh dua) dan pemilih perempuan berjumlah 290.174 (dua ratus sembilan puluh seratus enam puluh tujuh) tersebar di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tentu memiliki hambatan permasalahan, banyaknya desa dan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan pendidikan politik dan edukasi belum maksimal dilaksanakan, dalam hal ini juga upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone di tahun 2022 ini sudah terhitung 10 kali dalam menyelenggarakan pendidikan poliik dan juga tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan akan tetapi ajakan melalui spanduk yang disebar ke wilayah-wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Sampai saat ini juga pandemi *Covid-19* yang masih menyelimuti masyarakat di tingkat daerah hingga dunia juga merupakan salah satu hambatan karena tentu menghambat kerja kerja instansi dalam hal mempertahankan maupun meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone juga melakukan kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik dengan harapan masyarakat Kabupaten Bone menjadi pemilih-pemilih yang cerdas dan sebagai upaya dalam menyatukan pemahaman masyarakat dalam rangka menjalankan proses politik dalam berdemokrasi tentu tetap memperhatikan norma norma atau kaidah yang telah di tetapkan, beretika, sopan, santun serta dengan keteguhan dan berpegang pada falsafah dan kepribadian bangsa sehingga terwujudnya suatu proses demokrasi yang sesuai dengan nilai nilai luhur bangsa Indonesia dan dasar negara dan Pancasila. Kabupaten Bone terdapat beberapa masyarakat yang merasa tidak peduli dengan pendidikan politik, masyarakat merasa bahwa pendidikan politik hanya bagi mereka yang terjun dalam dunia politik. Rendahnya akan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik juga dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian otonomi daerah perlu dilakukan agar supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat lokal dan memberikan peluang pendidikan politik untuk berdemokrasi di daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masih ada masyarakat di Kabupaten Bone yang merasa tidak peduli dengan pendidikan politik, masyarakat merasa bahwa pendidikan politik hanya bagi mereka yang terjun dalam dunia politik. Rendahnya akan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik juga dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian otonomi daerah perlu dilakukan agar supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat lokal dan memberikan peluang pendidikan politik untuk berdemokrasi di daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang penulis angkat dalam tulisan ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ilham Agung Ashariadi (2020). Penelitian ini tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini, penulis terdahulu lebih memfokuskan pada menganalisis peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai fasilitator Pendidikan politik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Ada juga penelitian lain yaitu Mirwanto dan Ida Farida (2022) yang membahas tentang efektivitas kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, penulis terdahulu lebih menekankan pada faktor penghambat efektifitas pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang

mempengaruhi kinerja pegawai dalam bekerja dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif deskriptif. Berbeda dari dua penelitian terdahulu diatas. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang diangkat oleh penulis belum banyak dilakukan karena penelitian ini bersifat lokal dengan latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis melakukan kajian pada kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penulis juga lebih memfokuskan penelitian pada faktor penghambat dan faktor pendukung yang melatarbelakangi kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik pada masyarakat di Kabupaten Bone, serta upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang ada.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pelaksanaan pendidikan politik ,mengetahui kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik serta upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengatasi masalah pelaksanaan pendidikan politik di kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian bercirikan kegiatan pengumpulan, menggambarkan dan mentafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan, atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung yang kemudian dianalisa sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Tujuannya menggunakan deskriptif kualitatif dalam pelaksanaan penelitian ini untuk dapat mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Sub Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5. Sub bidang politik dan pemilu
6. Masyarakat (Mahasiswa)
7. Masyarakat (Pelajar)
8. Tokoh masyarakat

Penulis akan melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014:246). Reduksi data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara merangkum seluruh informasi yang berhubungan dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik . Hasil rangkuman tersebut kemudian diseleksi (eliminasi) berdasarkan kriteria yang lebih penting. Hal-hal penting tersebutlah akan menjadi fokus penelitian yang selanjutnya akan penulis gambarkan secara jelas. Adapun teknik penyajian data akan dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 6 hubungan antar informan, flowchart, dan sejenisnya yang berkaitan dengan kinerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik di Kabupaten Bone . Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan akhir akan dilakukan dengan cara menjadikan hasil kajian data sebagai kesimpulan akhir yang didukung oleh data-data dan menetapkan kesimpulan awal sebagai kesimpulan akhir dengan catatan jika tidak terdapat perubahan yang signifikan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik di Kabupaten Bone berdasarkan teori kajian oleh Simamora. Dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa dimensi kinerja yaitu dimensi kinerja, dimensi psikologis dan dimensi organisasi. Dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung.

3.1 Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Dimensi Individual

Berlandaskan informasi dan hasil pengamatan penulis melalui data - data dan dokumen yang ada. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone telah menyelenggarakan pendidikan politik sebagaimana yang telah dirumuskan yaitu melakukan sosialisasi dan diskusi – diskusi politik dengan metode tatap muka dimana pemateri memberikan paparan kepada peserta yang hadir. Namun metode ini tidak memberi dampak yang besar bagi masyarakat. Maka mereka mengganti metode sehingga mendapatkan feedback yang lebih maksimal, materi yang nantinya akan disampaikan dapat diterima oleh peserta dan kegiatan Pendidikan politik dapat berjalan dengan baik. Adapun indikator yang menjadi acuan pada dimensi individual adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan dan Keahlian

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari hasil pengamatan dan data yang didapat ada kegiatan rutin yaitu sosialisasi Pendidikan politik sebanyak sepuluh kali dari tahun 2022 hingga 2023.

b. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. aturan ini yang memberikan arahan serta fasilitasi proses pendidikan politik. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sejauh ini yakni sebatas kegiatan Penyuluhan (sosialisasi), Forum diskusi politik, sebagaimana metode tatap muka lainnya. Jika mengacu pada peraturan di atas maka kegiatan Pendidikan politik perlu ditingkatkan untuk mencapai acuan tersebut.

c. Demografi

Output dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan pendidikan politik tujuan utamanya adalah mencerdaskan masyarakat yakni melek politik, meningkatnya masyarakat Kabupaten Bone yang demokratis dan partisipatif.

2) Dimensi Psikologis

Persepsi attitude dari masing masing personal yang harus di berikannya pembelajaran dan motivasi untuk mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan pendidikan politik.

3) Dimensi Organisasi

Dalam sebuah organisasi sumber daya sangat perlu diperhatikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang akan sangat mempengaruhi kinerja dalam sebuah output dan juga

kepemimpinan yang efektif.

3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

a. Faktor Penghambat

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone tentang faktor penghambat dalam menjalankan tugas untuk meningkatkan Pendidikan politik. Faktor penghambat diantaranya yaitu yaitu Pertama, kompetensi staff yang berpengaruh pada kualitas, "sangat berpengaruh, karena salah satu peran Kesbagpol kabupaten Bone adalah sebagai fasilitator dalam hal kegiatan politik. Apabila kompetensi staff memiliki kualitas baik maka mempengaruhi sukses tidaknya kegiatan politik yang dilaksanakan dan menjadi salah satu indikator. Kompetensi disini dijelaskan sangat berpengaruh. penduduk merupakan salah satu yang mempengaruhi adanya kendala untuk melaksanakan pendidikan politik jika tempat terpencil ditakutkan kesulitan dalam menjangkau tempat tersebut. Kedua, penduduk merupakan salah satu yang mempengaruhi adanya kendala untuk melaksanakan pendidikan politik jika tempat terpencil ditakutkan kesulitan dalam menjangkau tempat tersebut. Ketiga, harus menerapkan kedisiplinan demi meningkatkan kinerja pegawai, tetapi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone mengenai penerapan disiplin pegawai itu belum 100% dilaksanakan karena masih banyak pegawai yang kurang disiplin seperti datang ke kantor yang tidak tepat waktu yang disebabkan oleh banyak kendala yang pegawai itu sendiri yang tahu apa penyebab mereka tidak bisa mendisiplinkan.

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang menentukan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dalam meningkatkan Pendidikan politik ialah : Pertama, Kepemimpinan dari badan kesatuan bangsa dan politik yang menunjukkan disiplin kerja sehingga memberikan pengaruh besar terhadap masing masing pegawai. Kedua, Motivasi dan semangat kerja tugas yang tinggi sehingga mendorong kualitas pelayanan. Peran disiplin kerja jika tidak ditegakkan pasti berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dan apabila tidak ada disiplin kerja dalam pekerjaan, para pegawai akan merasa tidak ada tanggung jawab yang besar dengan akibat yang akan ditimbulkan, Pasti kinerja pegawai akan menjadi rendah. Sebaliknya dengan adanya disiplin kerja pegawai akan semakin termotivasi pegawai dalam mengerahkan segala kemampuannya untuk meningkatkan kinerja dan dengan demikian dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta menyelesaikan tugas - tugas dengan baik.

3.3 Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Upaya Internal

1. Merumuskan Renstra dengan mengutamakan proses penyelenggaraan pendidikan politik yaitu penyempurnaan kegiatan – kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan pendidikan politik. Bertujuan supaya kegiatan proses penyelenggaraan pendidikan politik dapat berjalan lebih maksimal, efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya, guna meningkatkan kuantitas dari segi penyelenggaraan kegiatan. Dengan menjadikan kegiatan pendidikan politik sebagai kegiatan prioritas, secara tidak langsung anggaran yang didapatkan akan meningkat.
2. Meningkatkan suplai keuangan kepada partai politik dalam bentuk Bantuan keuangan partai politik, dengan catatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara lebih ketat pada presentase dana yang terfokuskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, lebih besar dan lebih efektif dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh partai politik itu.
3. Bersama – sama dengan Sub Bidang Politik Dalam Negeri untuk merumuskan silabus pelaksanaan kegiatan pendidikan politik agar pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih terarah baik dari segi materi ataupun kuantitas.

Memperbaharui metode dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang lebih inovatif serta cocok bagi seluruh kalangan masyarakat baik dari tingkat pendidikan maupun ekonomi masyarakat tersebut. Sehingga dapat menarik antusiasme dari masyarakat.

4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkompeten, baik dari penyelenggaranya yaitu Aparatur Sipil Negara dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dari para narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tersebut. Guna meningkatkan kualitas dari pelaksanaan pendidikan politik.

b. Upaya Eksternal

1. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah badan kesatuan bangsa dan politik.
2. Meningkatkan sosialisasi pentingnya pendidikan politik.
3. Meningkatkan komunikasi dari setiap stakeholder agar secara optimal dalam memberikan sosialisasi atau dalam bentuk mengoptimalkan pendidikan politik.
4. Mengikuti perkembangan masyarakat agar lebih mudah untuk berkomunikasi dan pendekatan untuk mempermudah tersampainya pendidikan politik secara efisien.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Pertama*, dalam mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bone digunakan teori kinerja yang meliputi tiga dimensi yaitu dimensi individual, dimensi psikologi dan dimensi organisasi. Ketiga dimensi ini sudah dijalankan dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, namun perlu ditingkatkan lagi. Seperti pada dimensi organisasi sumber daya yang perlu diperhatikan ialah sumber daya dalam organisasi tersebut agar kuantitas dan kualitas dari kinerja organisasi tersebut tetap terjaga. *Kedua*, salah satu faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik ialah kompetensi staff yang berpengaruh pada kualitas, "sangat berpengaruh, karena salah satu peran Kesbagpol kabupaten Bone adalah sebagai fasilitator dalam hal kegiatan politik. Apabila kompetensi staff memiliki kualitas baik maka mempengaruhi sukses tidaknya kegiatan politik yang dilaksanakan dan menjadi salah satu indikator. penduduk merupakan salah satu yang mempengaruhi adanya kendala untuk melaksanakan pendidikan politik jika tempat terpencil ditakutkan kesulitan dalam menjangkau tempat tersebut. Kemudian harus menerapkan kedisiplinan demi meningkatkan kinerja pegawai, tetapi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone mengenai penerapan disiplin pegawai itu belum 100% dilaksanakan. *Ketiga*, selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik di Kabupaten Bone diantaranya ialah Kepemimpinan dari badan kesatuan bangsa dan politik yang menunjukkan disiplin kerja sehingga memberikan pengaruh besar terhadap masing masing pegawai. Kedua, Motivasi dan semangat kerja tugas yang tinggi sehingga mendorong kualitas pelayanan. *Keempat*, Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone untuk mengatasi hal tersebut ialah secara internal maupun eksternal seperti Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkompeten, baik dari penyelenggaranya yaitu Aparatur Sipil Negara dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dari para narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik tersebut. Guna meningkatkan kualitas dari pelaksanaan pendidikan politik dan Mengikuti perkembangan masyarakat agar lebih mudah untuk berkomunikasi dan pendekatan untuk mempermudah tersampainya pendidikan politik secara efisien.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pendidikan politik sudah baik namun masih ada beberapa faktor penghambat seperti kuantitas SDM yang terbatas serta masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya Pendidikan politik karena mereka menganggap Pendidikan politik hanya bagi mereka yang terjun ke dunia politik. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait keberhasilan dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten Bone pada tahun 2024.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Sub Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Sub bidang politik dan pemilu, Masyarakat (Mahasiswa), Masyarakat (Pelajar), Tokoh masyarakat Kabupaten Bone dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ashariadi, I. A. 2021. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Jatinangor*.
- Farida, I. 2022. *Efektivitas Kinerja Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung*. 1(1), 69–74
- Sugiyono. 2016. *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Jakarta.